

## **BADAN PERMUSYAWARATAN DESA-KEPALA DESA-PERANGKAT DESA**

**2016**

**PERDA KAB. TEGAL NO, 14. LD TH 2016, NO, 14. TLD NO, 111. HLD. KAB. TEGAL**

**HLM : 1-21**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

**ABSTRAK** : - Bahwa menindak lanjuti surat Gubernur Jawa Tengah tanggal 3 Agustus 2015 nomor 180/011002 perihal Hasil Klarifikasi Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2015 dan Nomor 7 Tahun 2015, maka perlu dilakukan penyempurnaan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

- Dasar Hukum Perda ini adalah :

Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Th. 1945; UU N.o. 13 Th. 1950; UU No. 12 Th. 2011; UU No. 5 Th. 2014; UU No. 6 Th. 2014; UU No. 23 Th. 2014; PP No. 7 Th. 1986; PP No. 43 Th. 2014; Perda Kab. Tegal No. 2 Th. 2008; Perda Kab. Tegal No. 13 Th. 2007; Perda Kab. Tegal No. 6 Th. 2015.

- Dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan perubahan atas Perda Kab. Tegal Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Perubahan terjadi dalam pasal-pasal seperti :

- Pasal 6 ayat (3) dan (4) dihapus;
- Pasal 7 huruf g dihapus;
- Pasal 9 huruf g, o dan q dihapus;
- Pasal 13 dan 14 disisipkan 1 (satu) pasal baru yakni Pasal 13A;
- Ayat (1) dan ayat (2) Pasal 16 disisipkan 1 ayat (1a);
- Pasal 17 ditambah 1 ayat yakni ayat (3);
- Pasal 21 tetap;
- Pasal 22 diubah;
- Pasal 23 ayat (3) ditambah 1 (satu) huruf yakni, huruf e
- Pasal 32 dan 33 disisipkan 1 (satu) pasal baru yaitu Pasal 32A;
- Pasal 36 diubah;
- Pasal 43 huruf f dan s diubah, huruf e dan o dihapus;
- Pasal 44 diubah;
- Pasal 45 dan 46 dihapus;
- Pasal 50 huruf f diubah;

- Diantara Pasal 53 dan 54 disisipkan 1 (satu) pasal baru yaitu Pasal 53A;
- BAB III ditambah 4 bagian baru dan ditambah 5 (lima) pasal baru;
- Pasal 63 ayat (2) dan Pasal 77 dihapus.

- CATATAN** :
- Perda ini ditetapkan oleh Bupati Tegal pada tanggal 30 November 2016.
  - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan pada 30 November 2016.
  - Penjelasan 2 hlm.